

LAPORAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROVINSI GORONTALO

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI



RINGKASAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 – PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI



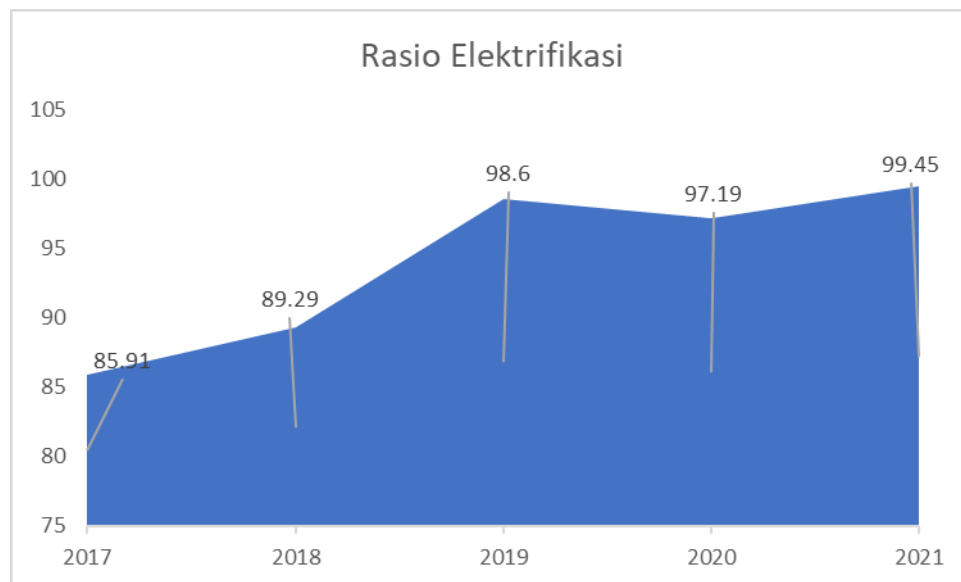
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN

Target yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah (1) menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern ; (2) peningkatan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global ; (3) melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat pada tahun 2030 ; (4) memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih dan (5) memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan.

Status Capaian

1. Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi (RE) adalah salah satu indikator utama pembangunan ketenagalistrikan yang menunjukkan perbandingan jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik baik dari listrik PLN maupun non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Rasio elektrifikasi di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2021, rasio elektrifikasi di Provinsi Gorontalo telah mencapai 99,45% (PLN).



2. Konsumsi Listrik Per Kapita

Jumlah pelanggan PLN di Gorontalo pada tahun 2021 sejumlah 320.234 pelanggan, meningkat 6,57 persen dibanding 2020. Bertambahnya pelanggan PLN tentu berpengaruh juga terhadap jumlah listrik yang terjual. Tercatat jumlah energi listrik yang terjual pada tahun 2021 mencapai 638.750 MWh, meningkat 4,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya (611.616 MWh). Sepanjang tahun 2021, distribusi listrik terbesar terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 64.027 MWh. Sementara yang terendah terjadi pada bulan April dengan total energi listrik yang terjual sebesar 48.922 MWh.

Selama ini, pemenuhan kebutuhan energi listrik di Gorontalo masih mengandalkan produksi PLN. Berdasarkan data BPS, kapasitas daya terpasang listrik PLN di 9 unit pembangkit PLN pada tahun 2021 mencapai 217.430 kW dengan jumlah daya mampu sebesar 178.550 kW.

Tabel : Daya Terpasang dan Daya Mampu Menurut Unit Operasi
di Provinsi Gorontalo Tahun 2021

| Unit | Daya terpasang (kW) | Daya Mampu (kW) |
|-----------------------|------------------------|--------------------|
| PLTD Telaga | 21,700 | 11,600 |
| PLTD Marisa | 1,530 | 1,200 |
| PLTMG Maleo | 100,000 | 94,000 |
| PLTMH Mongango | 1,200 | 1,150 |
| PLTU Anggrek | 55,000 | 45,000 |
| PLTU Molotabu | 21,000 | 9,000 |
| PLTMH Taludaa 1 dan 2 | 5,000 | 5,000 |
| PLTS Sumalata | 2,000 | 1,600 |
| PLTS Isimu | 10,000 | 10,000 |
| Total | 217,430 | 178,550 |

Tinjauan Status Pencapaian SDGs Untuk Tujuan-7

| Kode | Target/Indikator TPB | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | Capaian | | | Target Capaian | Status Capaian |
|-----------|---|-------------|--------|-------------|---------|--------|--------|----------------|----------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | | |
| 7.1 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. | | | | | | | | |
| 7.1.1* | Rasio elektrifikasi. | PLN | % | | 85.91 | 97.19% | 99.45% | Meningkat | Tercapai |
| 7.1.1.(a) | Konsumsi listrik per kapita. | PLN | kWh | 902.5 | | 460.37 | | | |



TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Target yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah :

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai kondisi nasional
2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi
3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan
4. Meningkatkan secara progresif efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi
5. Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki
6. Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan
7. Memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak
8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja
9. Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk local
10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

Status Capaian

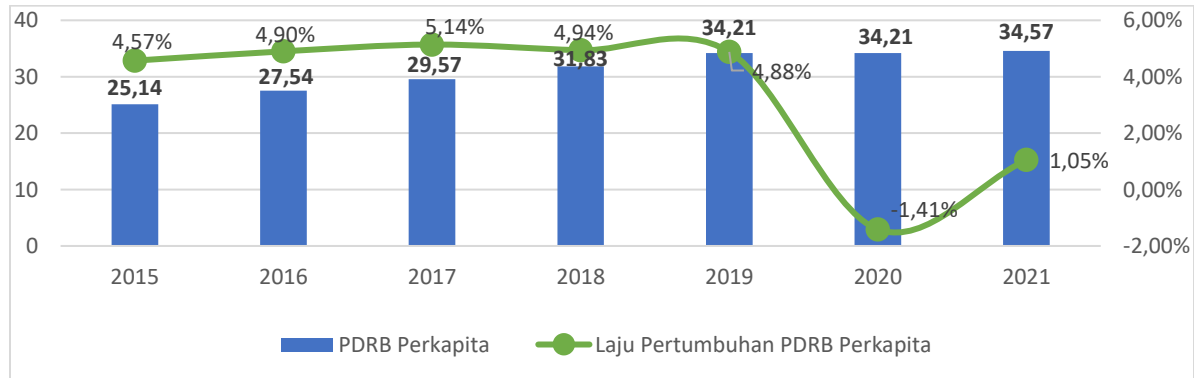
1. **Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai kondisi nasional**
PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita

PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan rata-rata 1,57 juta pertahun, atau meningkat rata-rata 15,68 % pertahun. Peningkatan PDRB perkapita ADHB tersebut menunjukkan bahwa peningkatan laju pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat. Akan tetapi ditahun 2020 PDRB perkapita mengalami stagnansi yang diakibatkan oleh pelemahan sektor-sektor ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Tahun 2020 PDRB Perkapita kembali naik sejalan dengan geliat

perekonomian masyarakat yang mulai kembali stabil pasca pandemi, sehingga PDRB Perkapita naik mencapai 34,57 Juta Rupiah.

Jika dilihat dari laju Pertumbuhan PDRB Perkapita, selama tahun 2015 hingga tahun 2019 laju pertumbuhan PDRB Perkapita terus tumbuh positif diatas rata-rata 4 %. Tahun 2017 mencapai pertumbuhan tertinggi pada angka 5,15 %. Namun demikian, tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB perkapita mengalami kontraksi hingga dilevel minus 1,41 persen. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan kegiatan ekonomi, yang berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat, terkontraksinya sektor perdagangan, transportasi, serta menurunnya investasi. Tahun 2021, Lau Pertumbuhan PDRB perkaita kembali tumbuh positif sebesar 1,05 persen, meskipun masih belum optimal, karena dalam tahap pemulihan pasca Pandemi Covid-19.

Grafik : PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (dalam juta Rupiah) dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)



Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

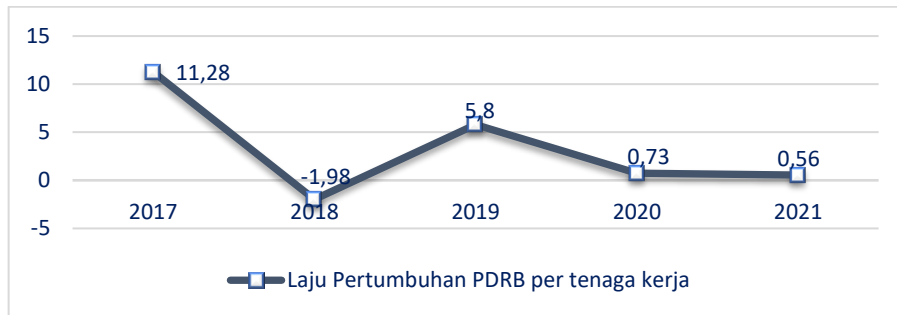
2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi

Laju Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDRB Riil per orang bekerja pertahun

Berdasarkan tingkat produktivitas tenaga kerja yang dilihat melalui indikator Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja, menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Selama 3 (tiga)

tahun terakhir produktifitas tenaga kerja menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2021 pertumbuhan PDRB riil per orang yang bekerja sebesar 0,56%, menurun dibanding tahun 2020 sebesar 0,73%. Kondisi ini juga dialami secara nasional, dimana tahun 2020 PDB riil per orang yang bekerja mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,84%. Pandemi covid-19 mempengaruhi tingkat produktifitas tenaga kerja, dimana permintaan akan barang dan jasa mengalami penurunan serta adanya pembatasan masyarakat yang berimplikasi terhadap penurunan tingkat produktifitas tenaga kerja.

Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021



Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Gorontalo. Tahun 2021, sektor ini menyerap sebesar 30,04 persen pekerja atau sebesar 173.913. Akan tetapi jumlah ini berkurang 8.456 pekerja jika dibandingkan dengan Agustus 2020, dan berkurang 4.220 pekerja jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019. Pengurangan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian mengisyaratkan adanya perubahan struktur ekonomi dari yang sebelumnya didominasi oleh sektor primer, perlahan mulai terdestraksi oleh sektor-sektor sekunder. Namun perlu diwasdapai semakin berkurangnya pekerja disektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mengindikasikan bahwa semakin tergerusnya tingkat pekerja disektor pertanian. Pekerja disektor pertanian masih didominasi oleh penduduk dengan usia lebih dari 40 tahun. Tahun 2021, jumlah pekerja usia diatas 40 tahun yang bekerja disektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 61,53 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 59,85 persen. Sementara untuk pekerja dibawah usia 40 tahun mengalami penurunan dari 40,15 % tahun 2020 menjadi 38,47 % tahun 2021. Hal ini

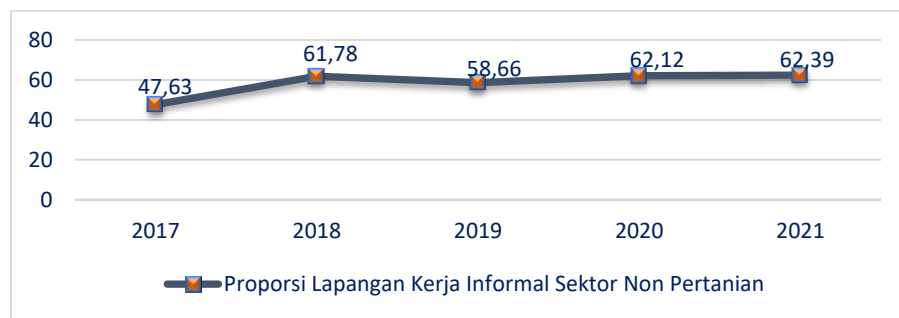
menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap pertanian, perikanan perlahan semakin berkurang.

3. **Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan**

Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.

Struktur penduduk yang bekerja di Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh pekerja sektor informal. selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan diatas 60 persen, meskipun ditahun 2019 sempat menurun menjadi 58,66 persen. Tahun 2021 proporsi penduduk bekerja pada kegiatan informal kembali naik mencapai 62,39 persen atau sebesar 361.244 orang dari total penduduk yang bekerja sejumlah 579.009.

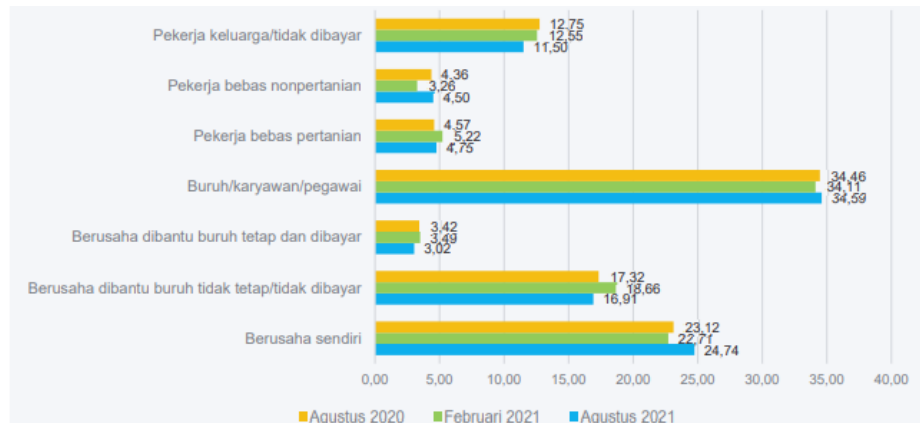
Grafik 2.3 Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian



Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Jika dilihat status pekerjaan tersebut, pada tahun 2021 penduduk yang bekerja pada kegiatan formal dengan status buruh/pegawai/karyawan sebesar 34,59 persen. Sementara untuk kegiatan informal dengan status berusaha sendiri tahun 2021 sebesar 24,74 persen, status pekerja bebas pertanian sebesar 4,75 persen, dan status pekerja bebas non pertanian sebesar 4,5 persen. Pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebesar 16,91 persen, dan status pekerja keluarga sebesar 11,6 persen dari total penduduk yang bekerja.

Grafik 2.4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut status Pekerjaan Utama Provinsi Gorontalo, 2020-2021



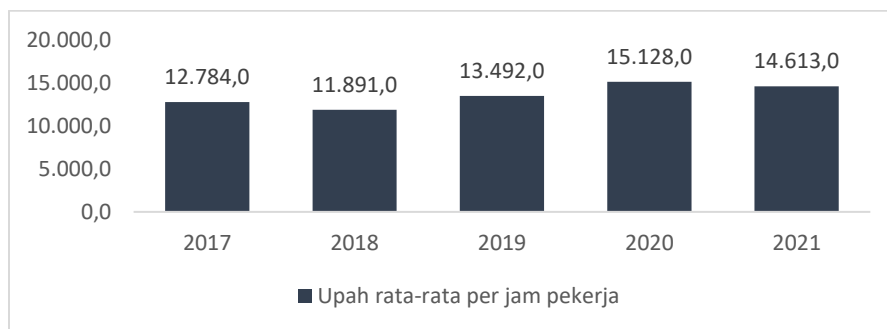
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja

Pekerjaan yang layak juga dipengaruhi oleh upah yang diterima oleh pekerja. Upah rata-rata jam pekerja merupakan gambaran tingkat kesejahteraan pekerja buruh secara umum, yang dilihat dari rata-rata pendapatan yang diterima serta perubahannya.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo tingkat pekerja per jam kerja tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2017. Meskipun demikian, tahun 2021 upah rata-rata per jam pekerja sebesar Rp. 14.613, turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp. 15.128,0. Khusus untuk tahun 2020, kenaikan tingkat upah lebih dikarenakan pengurangan jumlah jam kerja yang lebih besar dibanding perubahan upah, sehingga mengakibatkan upah per jam meningkat.

Grafik 2.6 Upah Rata-rata per jam pekerja



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Upah rata-rata per jam pekerja Provinsi Gorontalo jika dilihat dari tingkat pertumbuhannya belum menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup progresif. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan upah relatif sama dengan tingkat

inflasi. Hal ini mengindikasikan kenaikan upah rata-rata tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan pekerja.

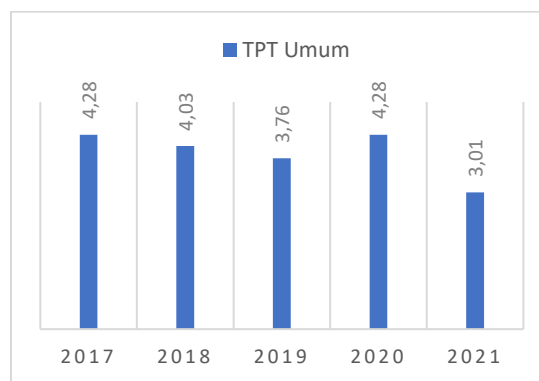
4. Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki

Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 8 yaitu meningkatkan daya serap Tenaga kerja untuk menekan tingkat pengangguran terbuka dan setengah penganggur. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka dan setengah penganggur mengindikasikan bahwa daya serap tenaga kerja semakin berkurang. Indikator setengah penganggur juga dapat menggambarkan tingkat kelayakan pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Sebelum pandemi Covid19, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo mengalami trend penurunan yaitu dari 4,28 persen ditahun 2017, turun menjadi 3,76 persen ditahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 4,28 persen. Tingkat pengangguran kembali menunjukkan kinerja positif ditahun 2021 yang turun hingga mencapai 3,01 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya serap pasar kerja terhadap tenaga kerja makin membaik seiring dengan perbaikan ekonomi daerah.

Grafik 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo 2017-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Pendorong utama penurunan ini adalah terjadinya penurunan TPT di wilayah perkotaan dari 6,42 persen pada Agustus 2020 menjadi 4,34 persen. Adapun TPT perdesaan juga mengalami penurunan dari 2,73 persen pada Agustus 2020 menjadi 2,01 persen pada

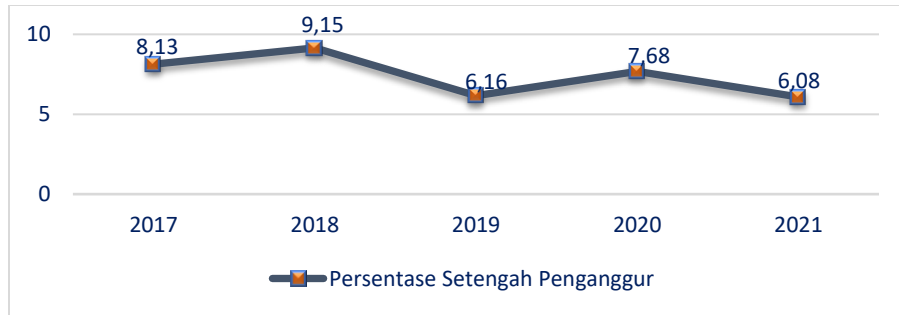
Agustus 2021. Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. TPT laki-laki pada Agustus 2020 sebesar 4,53 persen menurun menjadi 3,05 persen pada Agustus 2021 sedangkan TPT perempuan pada Agustus 2020 sebesar 3,86 persen menurun menjadi 2,94 persen pada Agustus 2021.

Persentase Setengah Pengangguran

Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah tingkat setengah pengangguran. Persentase setengah Penganggur merupakan pekerja yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran, mengindikasikan semakin banyak tenaga kerja yang kurang termanfaatkan dan menggambarkan semakin banyaknya pekerjaan tidak layak yang tersedia. Sesuai data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), faktor yang terkait setengah penganggur (*underemployed*), dikelompokkan menjadi dua, yaitu karakteristik demografi (umur, jenis kelamin, tempat tinggal dan tingkat Pendidikan), serta karakteristik ekonomi (sektor pekerjaan dan bidang pekerjaan).

Menurut Badan Pusat Statistik tingkat setengah pengangguran di Provinsi Gorontalo relatif sama dengan tingkat pengangguran. Tahun 2019 tingkat setengah penganggur mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan cukup besar ditahun 2020. Tahun 2021 tingkat setengah penganggur mengalami penurunan mencapai 6,08 persen atau sebanyak kurang lebih 35.199 jiwa. Meskipun demikian, tingkat setengah penganggur di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi, dibanding tingkat pengangguran secara umum yang jumlahnya sebesar 17.959 jiwa atau sebesar 3,01 persen ditahun 2021. Masih tingginya kondisi tenaga kerja setengah penganggur (*underemployed*) dikarenakan kesempatan kerja di Provinsi Gorontalo masih bergantung pada sektor pertanian dengan jam kerja yang relatif pendek dan sifatnya musiman.

Grafik 2.10 Persentase Setengah Penganggur



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat setengah penganggur di pedesaan jauh lebih tinggi dibanding di perkotaan. Jumlah setengah penganggur tahun 2021 di pedesaan mencapai 22.093 jiwa, sedangkan diperkotaan sebesar 13,106 jiwa. Kondisi ini dikarenakan karakteristik pekerjaan di pedesaan masih didominasi oleh sektor pertanian, yang tidak memerlukan jam kerja yang tinggi. Sementara di perkotaan, karakteristik pekerjaan cukup beragam dengan jam kerja yang relatif panjang dan sifatnya tetap. Meski demikian, tingkat setengah pengangguran di perkotaan dipengaruhi oleh sektor perdagangan yang bersifat informal dengan jam kerja yang relatif fleksibel.

Sementara jika dilihat dari jenis kelamin, tingkat setengah penganggur laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Tingkat setengah penganggur laki-laki sebesar 23.029 jiwa, sedangkan perempuan sebesar 12.170 jiwa. Tingkat setengah penganggur dilihat dari tingkat pendidikannya, masih didominasi oleh lulusan Pendidikan menengah yaitu sebanyak 14.655 jiwa, atau sebesar 41,63 persen dari total penduduk setengah penganggur sejumlah 35.199 jiwa.

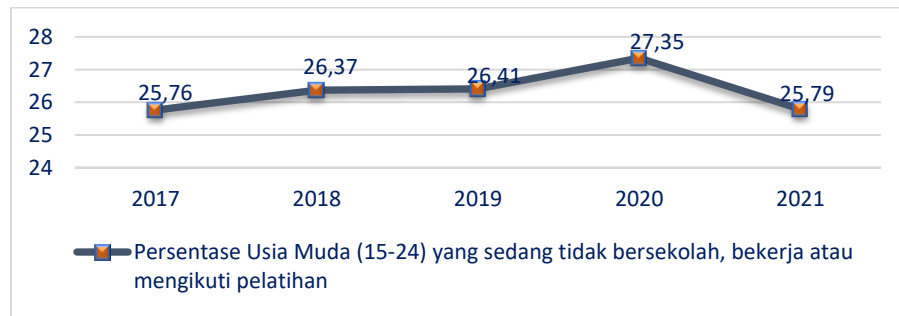
5. Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan

Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)

Salah satu target pembangunan berkelanjutan goals 8 adalah mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. Dimana di usia 15-24 tahun merupakan usia produktif yang idealnya pada jenjang umur tersebut dimanfaatkan untuk bersekolah, bekerja ataupun mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas keterampilan/soft skill.

Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan, memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan dari tingkat keaktifannya. Selama 5 (lima) tahun terakhir, proporsi kaum muda berusia 15-24 tahun yang tidak sekolah, bekerja atau tidak dalam pelatihan / Not in Education, Employment or Training (NEET) tidak mengalami perubahan yang signifikan, meskipun terjadi fluktuasi antar waktu. Tahun 2020 persentase NEET sempat mengalami kenaikan hingga 27,35%, akan tetapi tahun 2021 turun kembali menjadi 25,79 persen. Namun, angka ini masih terbilang cukup tinggi, diatas 25%, Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya tingkat partisipasi penduduk usia muda dalam kegiatan ekonomi.

Grafik 2.11 Persentase Usia Muda (15-24) yang sedang tidak bersekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan

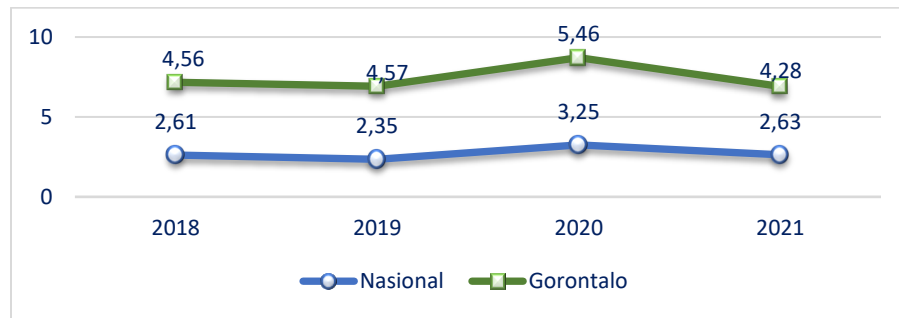


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

6. **Memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak**
Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Menurut Data Badan Pusat Statistik bahwa tingkat persentase pekerja anak di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi diatas rata-rata Nasional. Tahun 2021 persentase pekerja anak (10-17 tahun) sebesar 4,28 persen, turun dibanding tahun 2020. Dimana tahun 2020 dimasa Pandemi terjadi peningkatan persentase pekerja anak menjadi 5,46 persen. Hal ini disebabkan antara lain adanya pembatasan aktivitas sekolah, dan juga karena kesulitan ekonomi akibat pandemi, sehingga mendorong anak diusia tersebut bekerja untuk membantu menopang ekonomi keluarga.

Grafik 2.12 Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2022

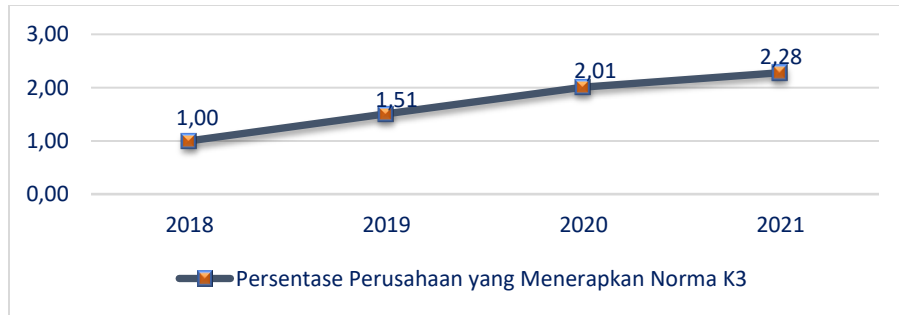
7. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan unsur penting dalam pengembangan program-program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan secara mutlak **bagi** pekerja terhadap potensi bahaya dan resiko yang dialami dan berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, pekerjaan, kesehatan dan lingkungan. Pelaksanaan K3 dapat mencegah dan meminimalkan kecelakaan kerja sehingga tercapai *zero accident* atau nihil kecelakaan kerja. Penerapan norma K3 sangat penting dalam menunjang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan serta peningkatan daya saing perusahaan dan keberlanjutan usaha. Selain itu, Penerapan Norma K3 sangat strategis untuk meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja muda sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.

Menurut Data Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi yang membidangi urusan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo, persentase perusahaan yang menerapkan norma K3 setiap tahunnya meningkat. Sampai dengan tahun 2021, jumlah perusahaan di Provinsi Gorontalo yang telah menerapkan norma K3 sejumlah 2.340 perusahaan atau sebesar 2,28 persen.

Grafik 2.13 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Norma K3



Sumber Data : Dinas Penanaman Modal ESDMT Provinsi Gorontalo, 2022

Dalam mengoptimalkan penerapan Norma K3, Dinas Penanaman Modal ESDMT Provinsi Gorontalo telah melakukan berbagai upaya preventif dan edukatif bagi perusahaan dalam menerapkan dan mengutamakan K3 melalui pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan/pengawasan ketenagakerjaan, pengujian, serta pelayanan pengaduan. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam penerapan norma K3 diantaranya kesenjangan antara jumlah pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan; keselarasan hukum; dan data yang akurat, khususnya untuk pekerja yang rentan dan ekonomi informal. Kurangnya data yang handal dan akurat di dalam laporan K3 dikarenakan sistem pengumpulan data, pelaporan, dan pengelolaan data K3 yang belum efektif. Belum mempunyai data K3 yang komprehensif sesuai harapan banyak pihak. Kondisi ini menjadi kendala dalam melakukan evaluasi. Pengembangan sistem pelaporan dan pengelolaan data yang terintegrasi juga membutuhkan kontribusi signifikan dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta serta masyarakat.

8. Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk local

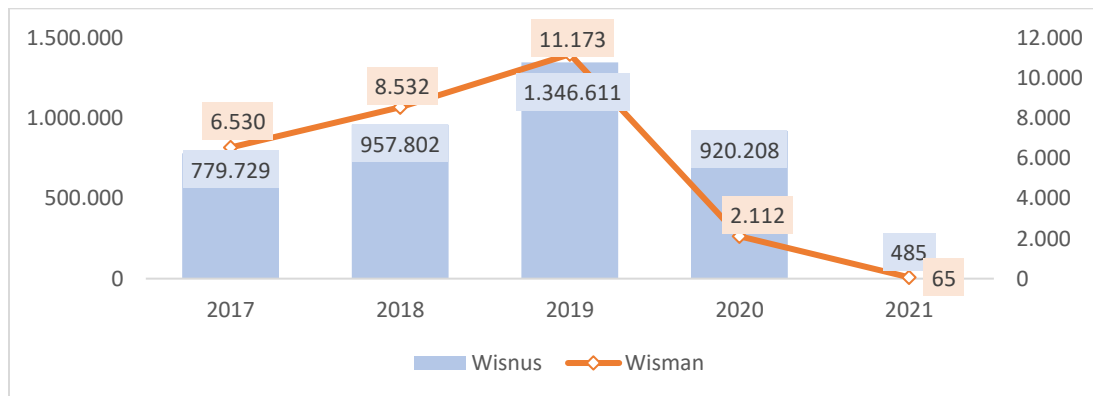
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor perekonomian lainnya seperti perdagangan, akomodasi, transportasi, jasa-jasa, serta industri. Dalam sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, beberapa indikator pembangunan pariwisata yaitu proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB, jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah wisatawan nusantara dan persentase penerimaan devisa pariwisata. Akan tetapi proporsi dan laju kontribusi pariwisata tidak secara eksplisit dihitung dalam struktur

perekonomian daerah, melainkan dilihat dari perkembangan sektor-sektor yang dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Demikian halnya dengan devisa pariwisata hanya diukur ditingkat Nasional. Pencapaian keberhasilan pembangunan sektor pariwisata daerah hanya dapat diukur berdasarkan peningkatan jumlah wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara

Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)

Menurut Data Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara mengalami penurunan cukup signifikan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat terdampak akibat Pandemi Covid-19. Padahal sebelum Pandemi Covid-19 tahun 2019 jumlah kunjungan wisnus dan wisman mencapai 1,4 juta kunjungan baik wisman maupun wisnus. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan juga berpengaruh terhadap rata-rata lama tinggal wisatawan yang hanya mencapai 1,32 hari.

Grafik 2.14 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2022

Peranan aktivitas wisatawan selain berkontribusi terhadap PDRB, juga berimplikasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karenanya pemerintah provinsi Gorontalo dengan dukungan Kabupaten/kota terus melakukan upaya dalam peningkatan sektor pariwisata. Kebijakan pembangunan kepariwisataan diarahkan melalui Pembangunan infrastruktur di beberapa lokasi wisata strategis Provinsi untuk meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata, Pemasaran Pariwisata, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Keberlangsungan industri pariwisata juga sangat bergantung pada

sektor-sektor swasta, kelompok usaha baik berupa perorangan maupun kelompok seperti Pokdarwis ataupun BUMDES Kepariwisataaan.

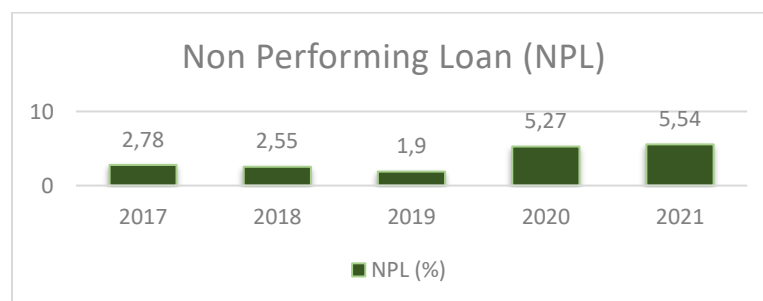
9. **Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.**

Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit

Dari data Bank Indonesia jumlah kantor Bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa belum ada pertumbuhan yang berarti selama 3(tiga) tahun terakhir yaitu pada 19 per 100.000 penduduk. Dalam hal ini peningkatan Lembaga keuangan juga sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Provinsi Gorontalo. Selain itu, ketersediaan layanan keuangan belum merata di seluruh wilayah, karena lebih banyak berada di Kota Gorontalo.

Akan tetapi jika dilihat dari kinerja stabilitas keuangan Gorontalo tahun 2021 tercatat membaik, hal ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Perbaikan tersebut tercermin pada kinerja penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran kredit dan kinerja aset yang tercatat tumbuh, di tengah perbaikan tingkat non-performing loan (NPL) yang merupakan indikator kesehatan asset suatu bank. Data Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa total kredit perbankan NPL Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 5,54 %, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,27 %.

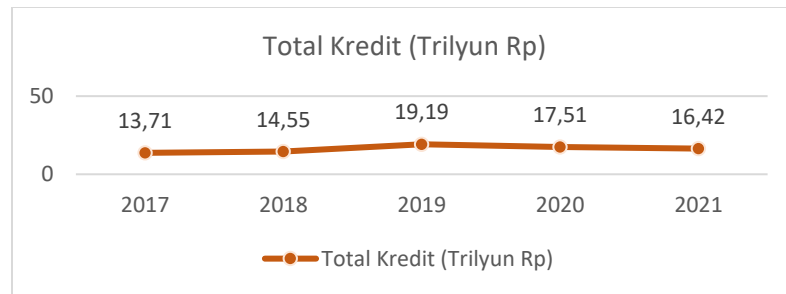
Grafik. 2.15 Indikator Kesehatan Perbankan Provinsi Gorontalo (Non Performing Loan) 2017-2022



Sumber : Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo

Sementara total kredit tahun 2021 sebesar 16,42 Trilyun Rupiah sedikit mengalami penurunan dibanding total kredit perbankan pada tahun 2020 sebesar 17,51 Trilyun Rupiah.

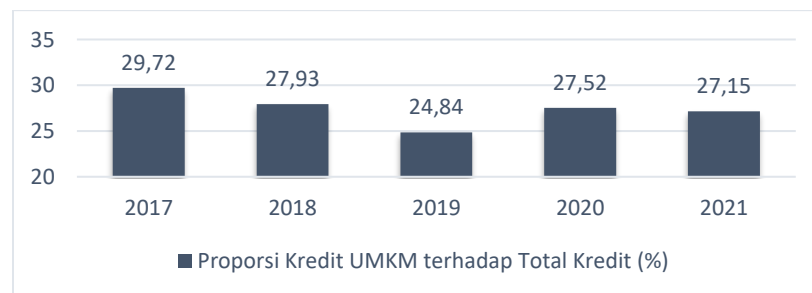
Grafik 2.16 Total Kredit Perbankan (2017-2021)



Sumber Data : Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo

Dari total kredit perbankan, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Bahkan ditahun 2020, disaat pandemi Covid-19, total kredit UMKM mengalami peningkatan yaitu sebesar 27,52 persen, sedangkan ditahun 2021 sedikit menurun menjadi 27,15 persen.

Grafik 2.17 Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit



Sumber Data : Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, 2022

Tinjauan Status Pencapaian SDGs Untuk Tujuan-8

| Indikator TPB | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | Capaian | | | | Target Capaian | Status Capaian |
|--|--|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | | | |
| Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. | | | | | | | | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | BPS | Persen | 0.00% | 5.14% | -1.41% | 1.05% | Meningkat | Tercapai |
| Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. | | | | | | | | | |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. | BPS | Persen | -3.81% | 11.28% | 0.73% | 0.56% | Meningkat | Tidak Tercapai |
| Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | | | | | | | | | |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. | BPS (Sakernas) | Persen | 46.70% | 47.63% | 62.12% | 62.39% | | |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. Rasio kredit : kredit UMKM/Total Kredit (BI) | Bank Indonesia OJK (Inklusi Keuangan) | Persen | | n.a | 27.50% | 27.15% | Meningkat | Tidak Tercapai |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja. | BPS (Sakernas) | Rupiah | 13,088.00 | 12,784.00 | 15,128.00 | 14,613.00 | Meningkat | Tidak Tercapai |
| Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | | | | | | | | | |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | BPS, Dokumen RPJMD | Persen | 4.281% (RPJMD) ; 2.76% (BPS) | | 4.28% | 3.01% | Menurun | Tercapai |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------|------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|----------------|
| 8.5.2.(a) | Persentase setengah pengangguran. | BPS | Persen | 28.35% L : 22.21% P : 37.21% | n.a | 7.68% | 6.08% | Menurun | Tercapai |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | BPS | | n.a | n.a | 27.35% | 25.79% | Menurun | Tercapai |
| Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya. | | | | | | | | | |
| 8.8.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. | RPJMD, Renstra Dinas PM-ESDMT | % | n.a | n.a | 2.01% | 2.28% | Meningkat | Tercapai |
| Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | | | | | | | | | |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara. | BPS dan Renstra Dispar | Orang | 5923 (BPS) ; 2542 (RPJMD) | 6,530 | 7,937 | 65 | Meningkat | Tidak Tercapai |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | BPS dan Renstra Dispar | Orang | 566394 (BPS) ; 313286 (RPJMD) | 624,450 | 759,023 | 485 | Meningkat | Tidak Tercapai |



TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Target yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah:

1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua
2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto
3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar
4. Meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan
5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri
6. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi
7. Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet.

Status Capaian

1. **Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua**

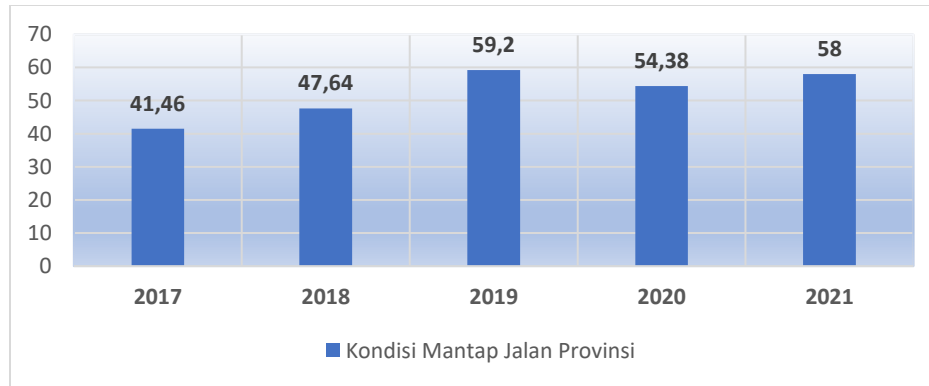
Kondisi Jalan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur memiliki nilai elastisitas yang tinggi dalam perekonomian disuatu wilayah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan melalui pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan provinsi, serta pembangunan jalan dan jembatan strategis provinsi sebagai akses pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan dan kesehatan, dan akses pemukiman.

Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km. Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017, panjang ruas jalan provinsi 467,17 Km dan jalan strategis provinsi 176,4 Km. Terjadi perubahan dan penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km. Penetapan status ruas jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jalan kolektor primer 3 (JKP-3), dan jalan strategis provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap perhitungan kondisi mantap jalan. Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 58persen, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 54,38 persen, sementara untuk kondisi kemantapan Jalan Nasional di Provinsi Gorontalo sebesar 89%.

Grafik

Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Pekerjaan Provinsi Gorontalo, 2022

Adapun kondisi jalan provinsi jika dibagi kedalam 5 kategori, sebagai berikut :

Tabel
Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan katagori kondisi jalan tahun 2019-2021

| No | Kondisi | Panjang (km) / persentase (%) | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Kondisi Baik | 197,02 km (42,17 %) | 220,600 km (47,22%) | 256,2 km (54,86%) |
| 2 | Kondisi Sedang | 37,27 Km (7,98 %) | 33,460 km (7,16%) | 11,36 km (2,43%) |
| 3 | Rusak Ringan | 56,48 km (12,09 %) | 104,660 km (22,40%) | 51,7 km (11,07%) |
| 4 | Rusak Berat | 176,4 km (40,76%) | 108,448 km (23,21%) | 147,75 km (31,64%) |
| | Total Panjang Jalan Provinsi | 467,17 Km | 467,17 Km | 467,01 Km |

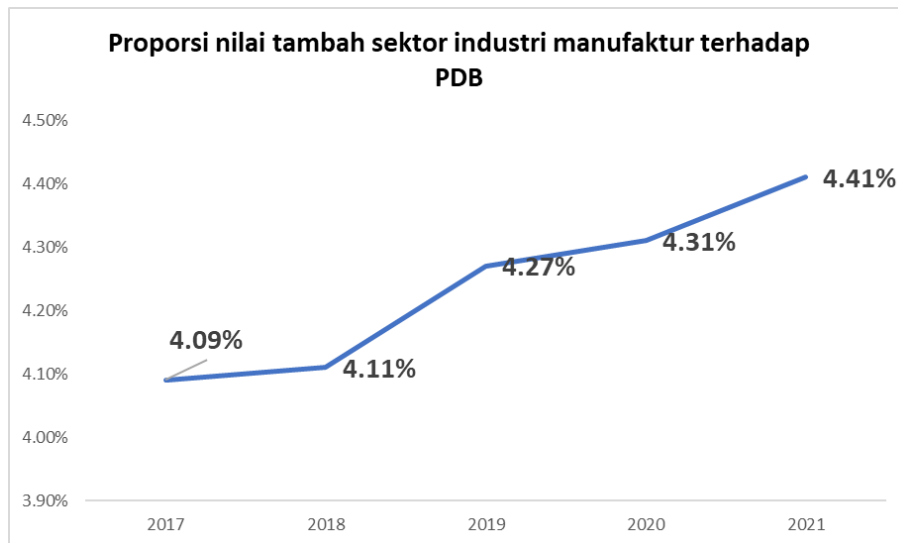
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2022

2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto

Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun

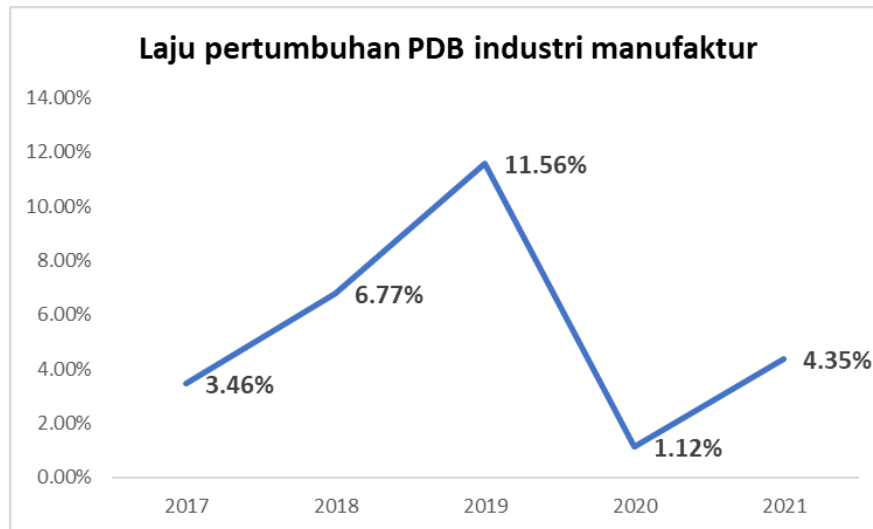
waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, perekonomian Provinsi Gorontalo tahun 2021 mengalami peningkatan setelah terjadi kontraksi tahun 2020 sebesar 0,02 persen. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 2,41 persen. Dari total PDRB Provinsi Gorontalo di tahun 2021, sector industry menyumbang kontribusi sebesar 4.41 persen. Kontribusi sector industry ini mengalami peningkatan dbandingkan tahun sebelumnya



Sumber : BPS (PDRB Provinsi Gorontalo)

Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur

Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan pada tahun 2021 melaju lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan Industri Pengolahan sebesar 5,35 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,13 persen.

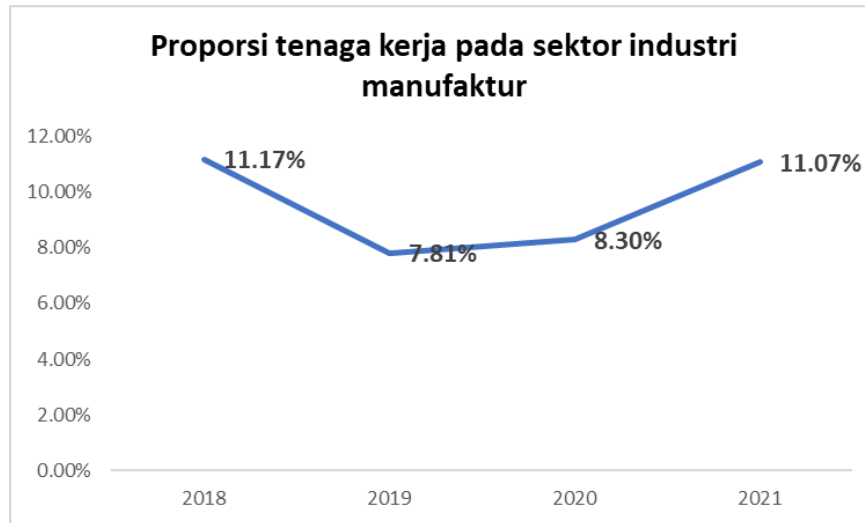


Sumber : BPS (PDRB Provinsi Gorontalo)

Hal ini dipicu oleh kenaikan yang cukup signifikan pada subkategori Industri Makanan dan Minuman sebagai subkategori utama. Selain itu, seluruh sub kategori lain juga turut menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi pada sub kategori Industri Mesin dan Perlengkapan yang masih mengalami kontraksi sebesar 2,14 persen. Walaupun, nilai pertumbuhan yang mengalami kontraksi tersebut tidak sedalam tahun sebelumnya yang mencapai 3,43 persen

Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

Dalam penyerapan tenaga kerja, sector industry merupakan salah satu sector yang cukup banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Gorontalo. Trend penyerapan tenaga kerja sector industry selama tahun 2018-2021 dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Sumber : BPS (Keadaan Angkatan Kerja Prov.Gorontalo, diolah kembali)

Dari grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2018, serapan tenaga kerja di sector ini menyumbang 11,17% penyerapan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2019 dan 2020, kemampuan serapan sector industry ini menurun dan pada tahun 2021 kembali meningkat signifikan menjadi 11.07%. Kenaikan proporsi tenaga kerja di sector industry ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik di sector industry pengolahan

Tinjauan Status Pencapaian SDGs Untuk Tujuan-9

| Indikator TPB | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | Capaian | | | Target Capaian | Status Capaian | |
|--|--|------------------------|-------------|---------|-------|-------|----------------|----------------|----------|
| | | | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | | | |
| Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | | | | | | | | | |
| 9.1.1.(a) | Kondisi mantap jalan nasional. | Satker P2JN | Persen | 94% | 96% | n.a | n.a | | |
| 9.1.2.(a) | Jumlah bandara. | Dinas Perhubungan | Unit | 0 | 1 | 1 | 1 | | Tetap |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan. | Dinas Perhubungan | Unit | 0 | 2 | 2 | 2 | | Tetap |
| 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis. | Dinas Perhubungan | Unit | 5 | 5 | 5 | 5 | | Tetap |
| Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. | | | | | | | | | |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita. | BPS | Persen | 4% | 4.09% | 4.31% | 4.41% | Meningkat | Tercapai |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | BPS (DDA) | Persen | 6.58% | 3.46% | 1.12% | 4.35% | Meningkat | Tercapai |
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | BPS (Sakernas dan DDA) | Persen | 16.06% | | 8.30% | 11.07% | Meningkat | Tercapai |



TUJUAN 10 : MENGURANGI KETIMPANGAN

Target yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah:

1. Mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional
2. Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
5. Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.
6. Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.
7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.

Status Capaian

1. Mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional

Koefisien Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi salah satunya melalui pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun tentunya meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Ini menandakan bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial.

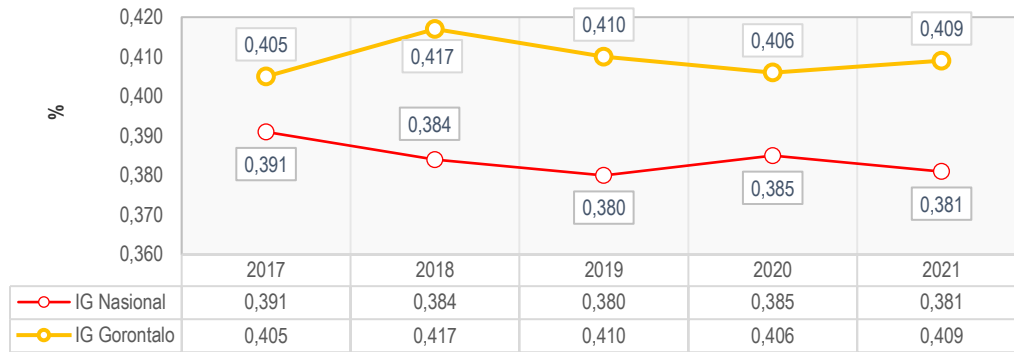
Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Kondisi kesenjangan di tingkat Provinsi Gorontalo dilihat dari capaian nilai indeks gini rasio. Berdasarkan nilai Indeks Gini Ratio menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan/kesenjangan pendapatan. Koefisien gini dibagi menjadi tiga indikator, yakni kurang dari 0,3 persen menunjukkan ketimpangan rendah, antara 0,3 sampai 0,5 persen menunjukkan ketimpangan menengah, dan lebih dari 0,5 persen menunjukkan ketimpangan tinggi. Statistik menunjukkan bahwa indeks gini Provinsi Gorontalo berada pada level menengah.

Nilai Gini Rasio Gorontalo selama periode September 2017-2021 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,409. Angka ini meningkat sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2021 dan naik 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2020.

Grafik

Indeks Gini Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021



Keterangan :

$G < 0,3$ = Ketimpangan Rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan Sedang

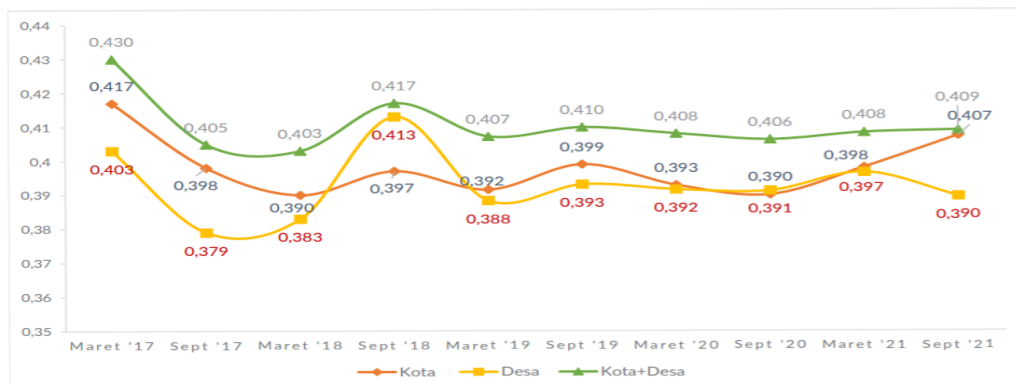
$G > 0,5$ = Ketimpangan Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 0,009 poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 0,398. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, terjadi peningkatan yang lebih signifikan yakni sebesar 0,017 poin dari gini rasio sebesar 0,390. Untuk daerah perdesaan, Gini Rasio pada September 2021 adalah sebesar 0,390, turun sebesar 0,007 poin dibandingkan Maret 2021 dan turun tipis sebesar 0,001 poin dibandingkan September 2020. Adapun Gini Rasio di daerah perdesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,397 dan pada September 2020 tercatat sebesar 0,391.

Grafik

Perkembangan Gini Ratio Provinsi Gorontalo, Maret 2017-September 2021



Sumber : Diolah dari Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS Provinsi Gorontalo, 2022

Perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran

penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2021 diantaranya adalah:

- a. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Gorontalo periode Maret 2021-September 2021 mengalami peningkatan mencapai 3,65 persen.
- b. Penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang paling besar hingga mencapai 4,06 persen dibandingkan kelompok lainnya. Adapun peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40 persen menengah adalah sebesar 3,46 persen dan kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 3,36 persen.
- c. Jika dibedakan menurut tempat tinggal, daerah perkotaan mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 3,26 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan penurunan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di daerah perdesaan yang sebesar 3,75 persen.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih menjadi permasalahan yang sangat serius, Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih diatas Nasional, berada pada posisi ke 5 dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

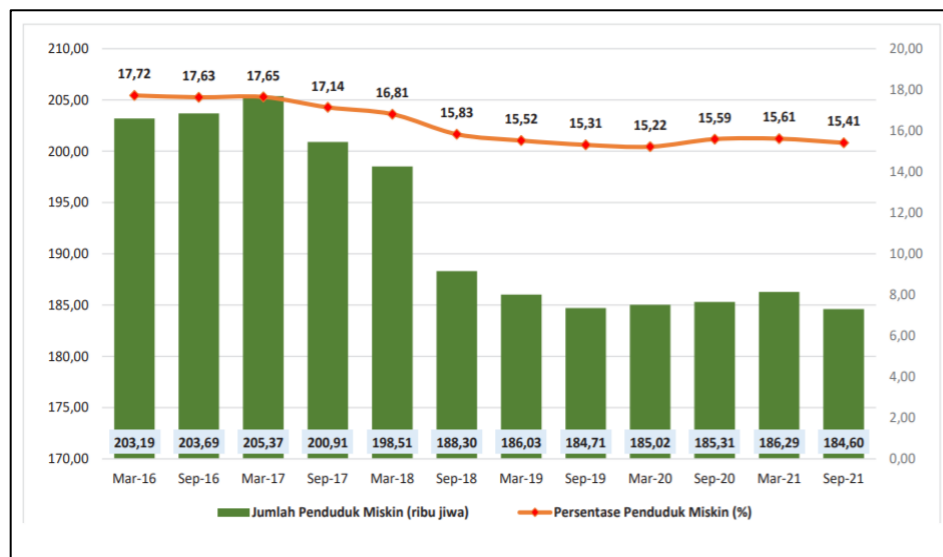
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal penanganan kemiskinan didaerah, mulai dari pemenuhan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur serta programprogram strategis lainnya. Jika dilihat dari perkembangan 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo cenderung menurun, meskipun masih berada diatas angka rata-rata kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen ditahun 2021. Penurunan tingkat kemiskinan paling signifikan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin

dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 di Provinsi Gorontalo menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan.

Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada periode Maret 2016-Maret 2020 mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, kecuali pada Maret 2017 yang sempat naik tipis dari September 2016. Penurunan tingkat kemiskinan paling signifikan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Pada September 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dibandingkan Maret 2021. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2016 sampai dengan September 2021 disajikan pada Gambar dibawah ini.

Grafik

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo, Maret 2016-September



Sumber: Diolah dari data Survey SosialEkonomi Nasional (Susenas)

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2021 mencapai 184,60 ribu orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,69 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,71 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021

tercatat sebesar 15,41 persen, menurun 0,20 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,18 persen poin terhadap September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021-September 2021, jumlah dan persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin perdesaan pada September 2021 tercatat sebanyak 163,09 ribu orang, turun sebanyak 1,1 ribu orang jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebanyak 164,19 ribu orang. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan kondisi September 2021 tercatat sebanyak 21,51 ribu orang, turun sebesar 0,58 ribu orang jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebanyak 22,09 ribu orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 4,06 persen, turun 0,17 persen poin dari kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 4,23 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 24,38 persen, turun 0,09 persen poin jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 24,47 persen.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp389.827,- per kapita per bulan dan pada September 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp400.504,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp10.677,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 2,74 persen. Pada September 2021, GKM untuk daerah perkotaan tercatat sebesar Rp298.372,- dan perdesaan sebesar Rp315.316,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan di daerah perdesaan kurang mengandung kalori dibandingkan pola konsumsi di perkotaan, sehingga untuk mendapatkan kalori yang standar (2100 kkal/hari) diperlukan harga yang lebih mahal. Sedangkan bila diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan adalah sebesar Rp102.847,- dan perdesaan sebesar Rp83.491,- maka terlihat bahwa di daerah perkotaan, GKNM cenderung lebih tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa penduduk di daerah perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk di daerah perdesaan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh konsumsi kebutuhan non makanan di perkotaan yang lebih banyak dengan harga relative lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, seperti komoditi perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan, serta jasa. Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di daerah perkotaan

pada September 2021 adalah sebesar Rp401.219,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di daerah perdesaan sebesar Rp398.806,- per kapita per bulan.

Pada periode Maret 2021–September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar 2,918 naik 0,043 poin dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 2,875, jika dibandingkan kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 2,863, nilai ini naik 0,055 poin. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami kenaikan 0,051 poin dari 0,721 pada Maret 2021 menjadi 0,772 pada September 2021. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 0,791, nilai ini turun sebesar 0,019 poin. Jika dibandingkan menurut daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan tercatat sebesar 0,550, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 4,792. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan tercatat sebesar 0,087, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 1,315.

Jumlah Desa Tertinggal dan Desa Mandiri

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat, terwujudnya perkembangan desa dan kelurahan, terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas, serta Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi.

Tahun 2021 Jumlah desa tertinggal yang dientaskan sebanyak 5 desa dari 5 desa yang ditargetkan. Berdasarkan Data Kementerian Desa, Indeks Desa Membangun Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 0,6736, dengan status berkembang, meningkat 2,32 persen dibanding tahun 2020 sebesar 0,6580. Indeks Desa membangun Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke-16 secara Nasional. Indikator pembentuk indeks desa membangun diukur dari beberapa dimensi seperti Dimensi Kesehatan, Dimensi Pendidikan, Dimensi Media Sosial,

Dimensi Permukiman, Dimensi Keragaman Produksi, Dimensi Perdagangan, Dimensi Akses Kredit, Dimensi Keterbukaan Wilayah serta Dimensi potensi dan tanggap bencana.

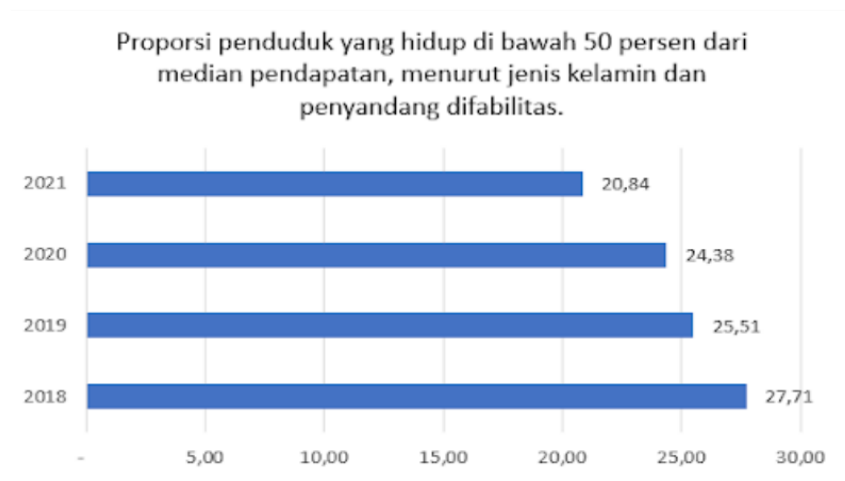
Tabel
Status Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2020

| KABUPATEN | JUMLAH KECAMATAN | JUMLAH DESA | JUMLAH DESA STATUS MANDIRI | JUMLAH DESA STATUS MAJU | JUMLAH DESA STATUS BERKEMBANG | JUMLAH DESA STATUS TERTINGGAL | JUMLAH DESA STATUS SANGAT TERTINGGAL |
|--------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| GORONTALO | 18 | 191 | 0 | 25 | 139 | 27 | 0 |
| BOALEMO | 7 | 82 | 0 | 15 | 59 | 7 | 1 |
| BONE BOLANGO | 18 | 160 | 2 | 50 | 88 | 20 | 0 |
| POHUWATO | 13 | 101 | 0 | 19 | 64 | 18 | 0 |
| GORONTALO UTARA | 11 | 123 | 0 | 13 | 92 | 18 | 0 |
| PROVINSI GORONTALO | 67 | 657 | 2 | 122 | 442 | 90 | 1 |

2. **Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya**

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan

Selang tahun 2018 sampai dengan 2021 penduduk Gorontalo yang berpenghasilan rendah menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas berhasil diturunkan dari 27, 71 persen menjadi 20, 84 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok bawah yang berpenghasilan rendah terus mengalami perbaikan tingkat kesejahteraannya. Program bantuan perlindungan sosial dan pemberdayaan yang bersumber dari APBD dan APBN memberikan kontribusi perbaikan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Efektivitas penentuan sasaran penerima manfaat utamanya masyarakat marginal menjadi poin penting dalam keberhasilan pencapaian indikator ini.



Tren positif ini, maka Provinsi Gorontalo optimis bahwa program dan kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian target TPB Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya dapat dicapai.

3. **Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.**

Indeks Kebebasan Sipil

Target TPB selanjutnya untuk mencapai pemerataan adalah Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. Berkaitan dengan target tersebut terdapat satu indikator yaitu Indeks Kebebasan. Data Indeks Kebebasan Provinsi Gorontalo menunjukkan fluktuatif berada pada kategori moderat bahkan cenderung tinggi dibanding dengan Indeks Kebebasan Nasional sebagaimana yang ditampilkan gambar dibawah ini.



Melalui tampilan grafik ini dapat dikatakan bahwa Indeks kebebasan Provinsi Gorontalo terus mengalami perbaikan. Walaupun sempat menurun di tahun 2018 dan 2019, namun di tahun 2020 angkanya naik 1, 12 poin. Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kebebasan sipil dalam hal berpendapat, berkumpul dan berserikat, berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Melalui indikator ini pula kita bisa memperoleh gambaran kesetaraan akses individu/ kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Tinjauan Status Pencapaian SDGs Untuk Tujuan-10

| Indikator TPB | | Sumber Data | Satuan | Tahun Dasar | Capaian | | | Target Capaian | Status Capaian |
|--|---|-------------------------|-----------|-------------|---------|--------|--------|----------------|----------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | | |
| Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi | | | | | | | | | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | RPJMD | Indeks | 0.410 | 0.405 | 0.406 | 0.407 | Menurun | Tidak Tercapai |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | BPS | % | 17.63% | 17.14% | 15.59% | 15.41% | Menurun | Tercapai |
| 10.1.1.(b) | Jumlah daerah tertinggal yang dientaskan | Kementerian PDT | Kabupaten | 3 | n.a | n.a | n.a | | |
| 10.1.1.(c) | Jumlah desa tertinggal. | Dinas PMD | Desa | | | | 90 | | |
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Mandiri | Dinas PMD | Desa | | | | 2 | | |
| 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | BPS | % | n.a | n.a | 24.28% | 20.84% | Menurun | Tercapai |
| Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. | | | | | | | | | |
| 10.3.1.(a) | Indeks Kebebasan Sipil. | BPS (Statistik Politik) | Indeks | 82.35 | 85.3 | 86.42 | n.a | | |



TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Target yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah sebanyak 19 target yang pada umumnya berupa target ditingkat nasional dan global. Dari beberapa target tersebut, target yang selaras dengan RPJMD Provinsi Gorontalo antara lain :

1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya
2. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi.

Status Capaian

1. **Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya**

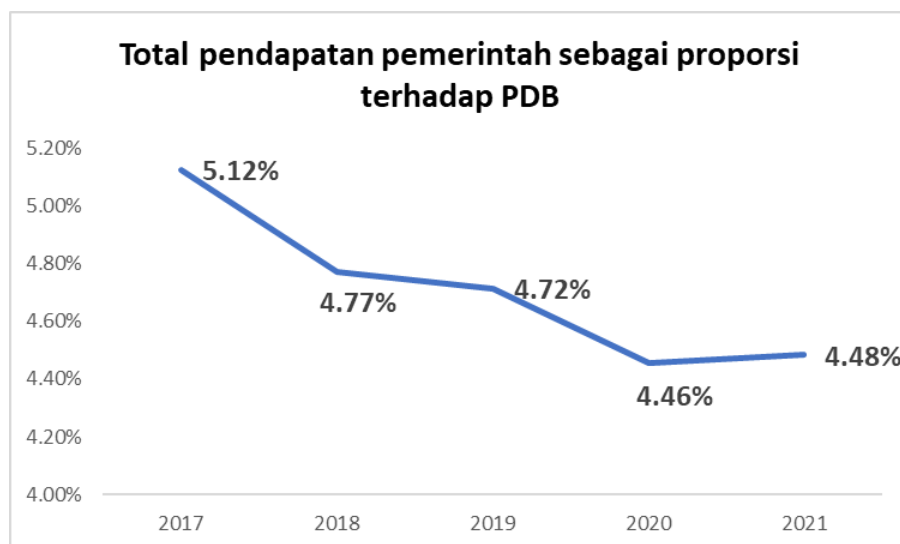
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah selang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| Uraian | TAHUN | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| | 2017 | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % |
| PENDAPATAN | 1.773.047.305.717,38 | 1.800.201.701.296,61 | 1,53 | 1.941.076.769.545,85 | 7,83 | 1.862.646.444.965,92 | - 4,04 | 1.968.370.374.668,08 | 5,68 |
| Pendapatan Asli Daerah | 348.267.663.013,38 | 384.435.306.402,61 | 10,39 | 433.427.781.398,85 | 12,74 | 414.861.588.271,92 | - 4,28 | 509.512.324.459,08 | 22,82 |
| Pajak Daerah | 309.671.369.999,00 | 350.425.924.306,00 | 13,16 | 387.400.916.778,00 | 10,55 | 352.171.235.900,00 | - 9,09 | 400.833.243.843,00 | 13,82 |
| Retribusi Daerah | 5.564.237.749,00 | 11.499.494.159,00 | 106,67 | 22.284.470.358,00 | 93,79 | 6.496.155.533,00 | - 70,85 | 5.575.147.290,00 | - 14,18 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 2.772.045.784,00 | 4.347.392.785,00 | 56,83 | 5.679.904.143,00 | 30,65 | 3.230.454.894,00 | - 43,12 | 5.092.544.065,00 | 57,64 |
| Lain-lain PAD yang sah | 30.260.009.481,38 | 18.162.495.152,61 | - 39,98 | 18.062.490.119,85 | - 0,55 | 52.963.741.944,92 | 193,23 | 98.011.389.261,08 | 85,05 |
| Pendapata Transfer | 1.424.264.276.967,00 | 1.415.182.154.507,00 | - 0,64 | 1.505.443.391.824,00 | 6,38 | 1.441.616.534.886,00 | - 4,24 | 1.456.453.867.885,00 | 1,03 |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 22.148.141.008,00 | 19.881.801.282,00 | - 10,23 | 13.537.847.000,00 | - 31,91 | 18.310.631.609,00 | 35,26 | 22.437.813.010,00 | 22,54 |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 3.859.571.657,00 | 1.738.620.779,00 | - 54,95 | 2.247.879.900,00 | 29,29 | 1.608.278.623,00 | - 28,45 | 2.218.899.125,00 | 37,97 |
| Dana Alokasi Umum | 997.598.871.000,00 | 1.006.924.707.000,00 | 0,93 | 1.043.126.752.000,00 | 3,60 | 944.270.446.000,00 | - 9,48 | 940.639.321.000,00 | - 0,38 |
| Dana Alokasi Khusus | 393.157.693.302,00 | 369.637.025.446,00 | - 5,98 | 436.242.138.924,00 | 18,02 | 445.006.020.654,00 | 2,01 | 451.415.054.750,00 | 1,44 |
| Dana penyesuaian dan otonomi khusus (DID) | 7.500.000.000,00 | 17.000.000.000,00 | 126,67 | 10.288.774.000,00 | - 39,48 | 32.421.158.000,00 | 215,11 | 39.742.780.000,00 | 22,58 |
| Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 515.365.737,00 | 584.240.387,00 | 13,36 | 2.205.596.323,00 | 277,52 | 6.168.321.808,00 | 179,67 | 2.404.182.324,00 | - 61,02 |
| Hibah | 515.365.737,00 | 584.240.387,00 | 13,36 | 2.058.820.031,00 | 252,39 | 5.308.321.808,00 | 157,83 | 1.959.237.740,00 | - 63,09 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - | 146.776.292,00 | - | 860.000.000,00 | 485,93 | 444.944.584,00 | - 48,26 |

Berdasarkan data diatas terlihat besarnya pendapatan daerah Provinsi Gorontalo dari berbagai sumber mencapai 1,968 triliun pada tahun 2021. Bila dibandingkan dengan PDRB Provinsi Gorontalo, besarnya pendapatan daerah ini mencapai 4,48%. Rasio total pendapatan daerah dibandingkan dengan PDRB Provinsi Gorontalo selama periode 2017-2021 dapat dilihat dalam grafik berikut :



Bila dibandingkan dengan kondisi baseline (2017), rasio pendapatan terhadap PDRB menunjukkan trend penurunan sepanjang tahun 2017-2020 dan pada tahun 2021 rasio ini mengalami sedikit kenaikan. Penurunan rasio pendapatan terhadap PDRB ini tentunya perlu memperoleh perhatian serius karena akan berdampak pada penurunan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan sehingga kedepannya akan berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB

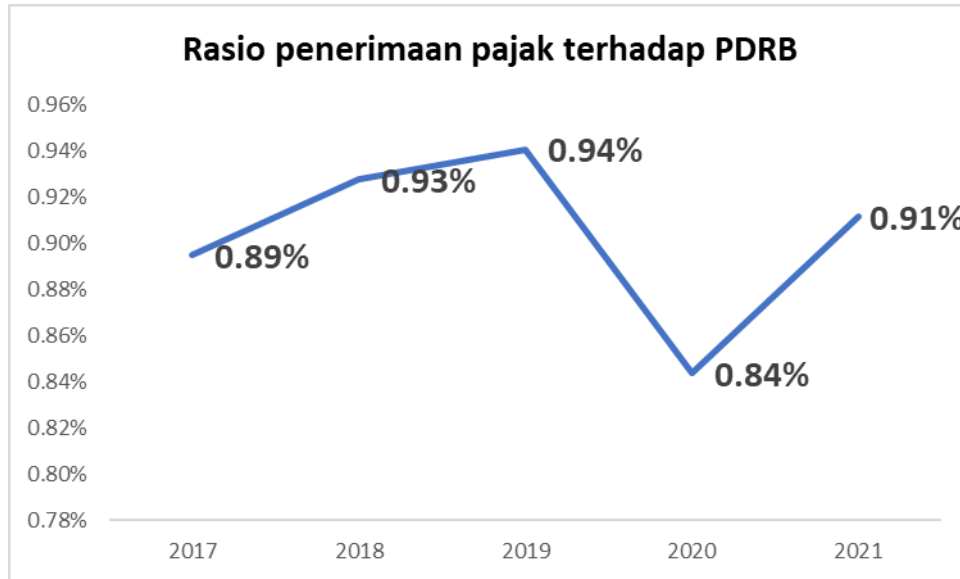
Salah satu komponen dalam struktur pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah yang didalamnya terdapat komponen pajak daerah. Besar kecilnya PAD ini menunjukkan tingkat kemandirian fiscal suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah maka kemandirian fiscal daerah semakin baik, demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian akan menjelaskan seberapa besar kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya, kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakatnya sendiri, semakin kecil ketergantungan dengan pemerintah pusat akan semakin membuka peluang bagi daerah untuk lebih mandiri. Rasio kemandirian keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Rasio Kemandirian Keuangan
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

| TAHUN | PAD (Rp) | PENDAPATAN DAEARAH (Rp) | RASIO (%) |
|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 2017 | 347.786.573.104,90 | 1.773.047.305.717,38 | 19,62 |
| 2018 | 384.435.306.402,61 | 1.800.201.701.296,61 | 21,36 |
| 2019 | 433.427.781.398,85 | 1.941.076.769.545,85 | 22,33 |
| 2020 | 412.734.907.848,50 | 1.862.646.444.965,92 | 22,16 |
| 2021 | 502.898.004.872,08 | 1.968.370.374.668,08 | 25,55 |

Adapun realisasi pajak daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 sebesar 400,83 milyar rupiah. Adapun rasio pajak daerah dengan PDRB Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 mencapai 0,91%. Trend rasio pajak daerah terhadap PDRB selama tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :



Dari grafik diatas terlihat bahwa rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan trend peningkatan selama tahun 2017-2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, rasio ini kembali meningkat seiring dengan adanya recovery ekonomi.

Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestic

Indikator lain yang diamati terkait keuangan daerah adalah proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestic. Untuk Provinsi Gorontalo, rasio pajak daerah terhadap APBP pada tahun 2021 sebesar 20.33%. Trend rasio ini selama tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :



Dari grafik diatas terlihat adanya trend peningkatan yang konsisten dari rasio pajak daerah terhadap APBD meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan. Trend positif ini menunjukkan semakin membaiknya struktur anggaran pemerintah daerah Provinsi Gorontalo selama 5 tahun terakhir.

Tinjauan Status Pencapaian SDGs Untuk Tujuan-17

| Indikator TPB | | Sumber data | Satuan | Tahun Dasar | Capaian | | | Target Capaian | Status Capaian |
|---|--|-------------------------------|---------|-------------|---------|--------|--------|----------------|----------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | | |
| Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | | | | | | | | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | | Persen | | 5.12% | 4.46% | 4.48% | Meningkat | Tercapai |
| | PDRB | BPS | Triliun | 0.00 | 34.54 | 41.73 | 43.90 | | |
| | Pendapatan Pemerintah | RPJMD, Badan Keuangan | Triliun | | 1.77 | 1.86 | 1.968 | | |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | | Persen | | 0.89% | 0.84% | 0.91% | Meningkat | Tercapai |
| | Pajak Daerah | Badan Keuangan | Triliun | 320 | 0.309 | 0.352 | 0.400 | | |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | RPJMD, Renstra Badan Keuangan | Persen | n.a | 17.46% | 18.92% | 20.33% | Meningkat | Tercapai |
| | Pajak Daerah | | Juta | n.a | 0.309 | 0.352 | 0.400 | | |
| | APBD | | Juta | n.a | 1.77 | 1.86 | 1.968 | | |
| Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global | | | | | | | | | |
| 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband. | BPS | Persen | 19.63% | n.a | n.a | | | |

